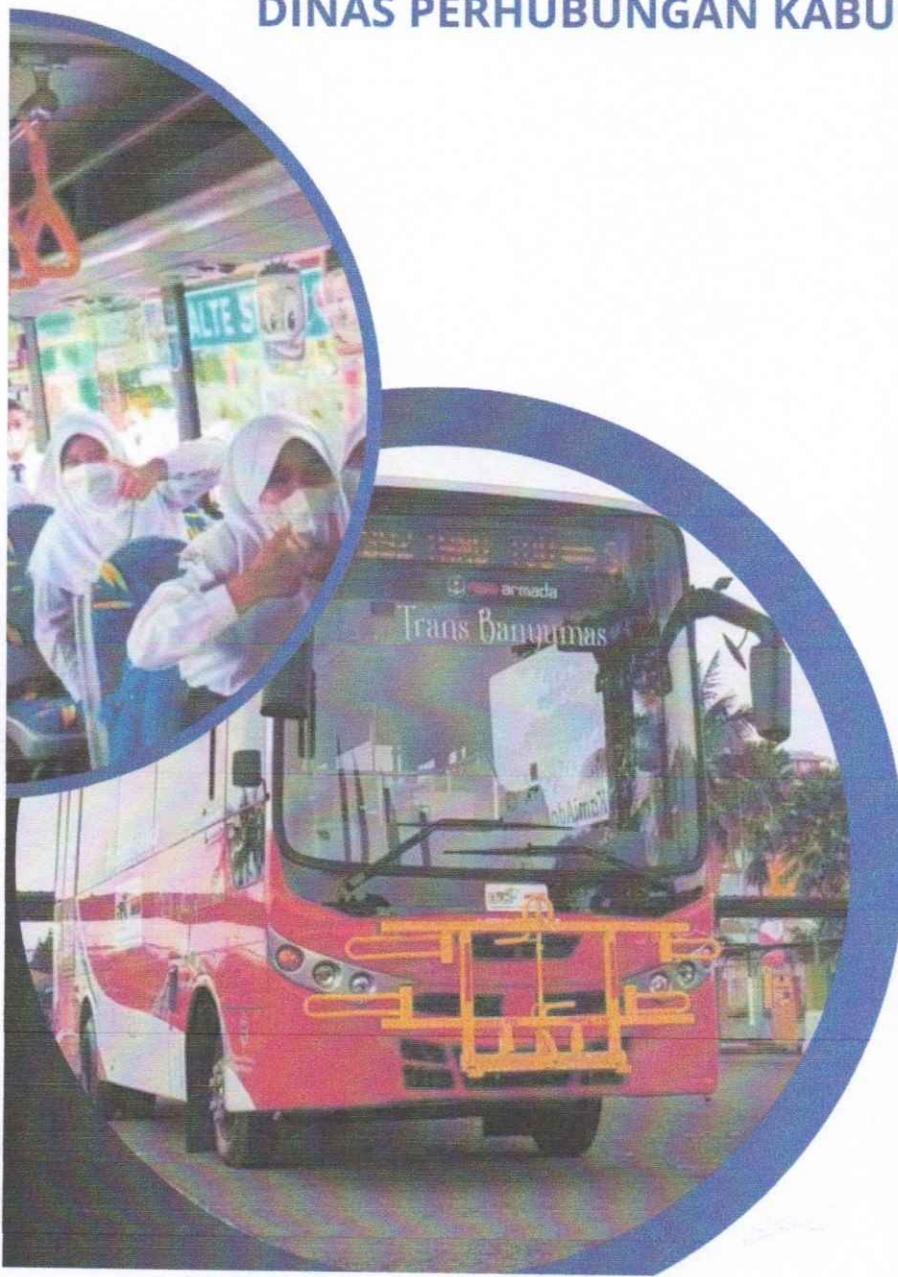




REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

2025



BAB I **GAMBARAN UMUM**

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang operasional dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagai Instansi Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yakni "Banyumas 2025 sejahtera, mandiri, maju, dan berdaya saing serta lestari". Tujuan kedua adalah " Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah ", dengan menyediakan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung kegiatan ekonomi, dilakukan upaya untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik investasi

di Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan misi pelayanan yang harus diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Sebagai bagian dari arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas membutuhkan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perubahan yang akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Review RTP ini merinci rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan disesuaikannya atas evaluasi laporan hasil review dokumen RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024, dengan harapan dapat

menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 10) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

13) Keputusan Kapala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 700/73/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

3. Maksud dan Tujuan

Pengadaan Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan proses formal untuk mengatur dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan kembali terhadap Rencana Tindak Pengendalian yang sudah ada. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

a. Maksud

Pengadaan Review RTP adalah sebagai tindak lanjut dari evaluasi laporan hasil review dokumen RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 serta memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dari pengadaan RTP:

b. Tujuan

- Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian agar rencana tindak lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada
- Memastikan bahwa rencana tindak tersebut dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan
- Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak dan menyusun strategi mitigasi yang tepat

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen Review RTP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

5. Ruang Lingkup

Review RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Review RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Penyusunan review RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat banyumas, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) pengawasan internal dan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan/gagal.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Berkelanjutan Pengendalian Intern

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atas dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pembangunan lingkungan Dinas Perhubungan Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan TanggungJawab yang Tepat	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas kondisi lingkungan pengendali diketahui semua sub unsur ada pada katagori memadai.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan		
	Survey karakteristik perjalanan masyarakat kawasan perkotaan purwokerto	Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Triwulan IV
	melakukan penagihan tepat waktu dan memperbaiki SOP melkanisme penyetoran atas penerimaan pendapatan retribusi	Kepala Bidang Prasarana dan Kassubag Keuangan	Triwulan IV
	melakukan sosialisasi peraturan terkait Pengelolaan Keuangan kepada pengelola keuangan Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas	Triwulan IV
	Sosialisasi kepada pengelola parkir agar melaksanakan seluruh kewajiban pengelola parkir sebagaimana tertuang dalam perjanjian	Kepala Bidang Dalops dan Perparkiran, Kepala Seksi Perparkiran	Triwulan IV
	melakukan survey rencana umum jaringan trayek di wil. Kabupaten Banyumas	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Kepala Seksi Angkutan	Triwulan IV

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (operasional) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko operasional Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko operasional OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dalam RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026 telah menetapkan visi dan tujuan Kabupaten Banyumas sesuai RPJPD 2015-2025. Visi tersebut adalah “Banyumas 2025 sejahtera mandiri, maju dan berdasayasaing serta lestari”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dalam RPD 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan pangan;
- b. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya Saing.

Keempat tujuan RPD tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendukung tujuan keempat pada RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah”.

Dalam upaya pencapaian tersebut tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Perhubungan Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Operasional/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota
		4. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota
		5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota
		6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kondisi baik
		7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan
		8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan
		9. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah angkutan umum yang beroperasi

No	Konteks	Tujuan Operasional/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah kab/kota yang ditetapkan Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
		11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik
		12. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi
		13. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		<ul style="list-style-type: none"> prosentase wilayah yang terhubung angkutan Sungai Jumlah Dokumen kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota
		14. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan

No	Konteks	Tujuan Operasional/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		15. Pembangunan Penerbitan Izin dan Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
		16. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		17. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		18. Administrasi Umum Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		19. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
		20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perhubungan
Kabupaten Bayumas*

2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang kami lakukan, kami menemukan 28 (dua puluh delapan) risiko operasional, yang terperinci sebagai berikut:

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
1	Audit dan Inspeksi tidak memberikan efek jera bagi pelanggar
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
3	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik
4	Usulan Penyediaan Perlengkapan Jalan tidak dapat dilakukan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
5	(RESIKO KEMITRAAN) Terjadinya Keterlambatan penyetoran retribusi parkir oleh koordinator parkir
6	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7	Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan umum
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
8	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
9	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender
10	(RLL) Keterlambatan pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai
11	(PPP) Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak dapat dilaksanakan
12	(PPP) Kurangnya keamaan lalu lintas sungai

13	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis
14	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara
15	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/ merk/produk tertentu
16	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS
17	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
18	Munculnya terminal bayangan
19	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retibusi Kios Terminal Tipe C
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
20	Terhambatnya kegiatan pengoperasian dermaga sungai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
21	Penyajian Data Perencanaan tidak tepat waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
22	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
23	Keterlambatan Dokumen diketahui atau sampai kepada Pimpinan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
24	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
25	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa
26	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
28	Penyedia Jasa masih kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.C : Identifikasi RSO Operasional OPD

3. Analisis Risiko

a. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis menggunakan kriteria penilaian risiko yang tercantum dalam Lampiran. Penilaian nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap Aparatur

Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi terkait Resiko Operasional adalah sebagai berikut:

No	Skala Risiko	Level Resiko	"Risiko yang Teridentifikasi"
1	4.18	sangat rendah	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
2	4.2	sangat rendah	Keterlambatan Dokumen diketahui atau sampai kepada Pimpinan
3	5.5	Rendah	Audit dan Inspeksi tidak memberikan efek jera bagi pelanggar
4	5.06	Rendah	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik
5	5.04	Rendah	Usulan Penyediaan Perlengkapan Jalan tidak dapat dilakukan
6	4.83	sangat rendah	Terhambatnya kegiatan pengoperasian dermaga sungai
7	4.6	sangat rendah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan
8	5.75	Rendah	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan
9	5.5	Rendah	(RESIKO KEMITRAAN) Terjadinya Keterlambatan penyetoran retribusi parkir oleh koordinator parkir
10	4.4	sangat Rendah	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
11	5.28	Rendah	Munculnya terminal bayangan
12	6.72	Rendah	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan
13	5.5	Rendah	Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan umum
14	4.6	sangat Rendah	Penyedia Jasa masih kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan
15	4.4	sangat Rendah	(PPP) Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak dapat dilaksanakan
16	4.83	sangat Rendah	(PPP) Kurangnya keamaan lalu lintas sungai
17	4.83	sangat Rendah	(RLL) Keterlambatan pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai

No	Skala Risiko	Level Resiko	"Risiko yang Teridentifikasi"
18	5.75	Rendah	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis
19	4.6	sangat Rendah	Penyajian Data Perencanaan tidak tepat waktu
20	4.6	sangat Rendah	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa
21	4.8	sangat Rendah	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara
22	4.83	sangat Rendah	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu
23	4.8	sangat Rendah	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS
24	5	Rendah	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED
25	5.28	Rendah	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender
26	25	sangat tinggi	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas
27	25	sangat tinggi	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C
28	25	sangat tinggi	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah

Dalam analisis risiko Operasional, tidak ada risiko yang mencapai level sedang hingga sangat tinggi; hanya terdapat risiko pada level rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, risiko tersebut tidak memerlukan proses mitigasi risiko.

Form 4c : Rekap Skala Risiko Operasional

b. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, diputuskan untuk memprioritaskan penanganan risiko dengan tingkat "Sangat Tinggi", "Tinggi", dan "Sedang". Pemerintah daerah akan membangun pengendalian untuk

mengurangi kemungkinan munculnya risiko (preventif), mengurangi dampak risiko yang terjadi (mitigatif), atau keduanya. Rincian lengkap daftar risiko prioritas dapat dilihat di Lampiran I, *Form 5 c Rekap Skala Risiko Operasional*.

c. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- 1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

- 2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko operasional pemerintah daerah, operasional (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

- 3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.
- 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)
- 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 100.1.2/792/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah :

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Penyusunan peta kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7

BAB VI.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait agar lebih efektif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merumuskan strategi komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi tentang perbaikan pengendalian yang akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan perbaikan pengendalian dengan efektif.

Beberapa sarana dan bentuk komunikasi yang efektif untuk menginformasikan rencana perbaikan pengendalian risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa meliputi Rapat Koordinasi. Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*.

BAB VII. **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut adalah pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai rencana tindak penegendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadinya risiko yang telah teridentifikasi, maka Dinas Perhubungan perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pementauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, form 10 (*kolom d-g, dan kolom j-k*).

BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merinci rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan disesuaikannya atas evaluasi laporan hasil review dokumen RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 serta sebagai dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran-lampiran

Form 1A CEE

No	Pertanyaan/Walutaner	JAWABAN KORESPONDED [S]																																								RESPONSLAH KUISIONER CEE Afirmatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	5510	5511	5512	5513	5514	5515	5516	5517	5518	5519	5520	5521	5522	5523	5524	5525	5526	5527	5528	5529	5530	5531	5532	5533	5534	5535	5536	5537	5538	5539	5540	5541	5542	5543	5544	5545	5546	5547	5548	5549	5550	5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	55510	55511	55512	55513	55514	55515	55516	55517	55518	55519	55520	55521	55522	55523	55524	55525	55526	55527	55528	55529	55530	55531	55532	55533	55534	55535	55536	55537	55538	55539	55540	55541	55542	55543	55544	55545	55546	55547	55548	55549	55550	55551	55552	55553	55554	55555	55556	55557	55558	55559	555510	555511	555512	555513	555514	555515	555516	555517	555518	555519	555520	555521	555522	555523	555524	555525	555526	555527	555528	555529	555530	555531	555532	555533	555534	555535	555536	555537	555538	555539	555540	555541	555542	555543	555544	555545	555546	555547	555548	555549	555550	555551	555552	555553	555554	555555	555556	555557	555558	555559	5555510	5555511	5555512	5555513	5555514	5555515	5555516	5555517	5555518	5555519	5555520	5555521	5555522	5555523	5555524	5555525	5555526	5555527	5555528	5555529	5555530	5555531	5555532	5555533	5555534	5555535	5555536	5555537	5555538	5555539	5555540	5555541	5555542	5555543	5555544	5555545	5555546	5555547	5555548	5555549	5555550	5555551	5555552	5555553	5555554	5555555	5555556	5555557	5555558	5555559	55555510	55555511	55555512	55555513	55555514	55555515	55555516	55555517	55555518	55555519	55555520	55555521	55555522	55555523	55555524	55555525	55555526	55555527	55555528	55555529	55555530	55555531	55555532	55555533	55555534	55555535	55555536	55555537	55555538	55555539	55555540	55555541	55555542	55555543	55555544	55555545	55555546	55555547	55555548	55555549	55555550	55555551	55555552	55555553	55555554	55555555	55555556	55555557	55555558	55555559	555555510	555555511	555555512	555555513	555555514	555555515	555555516	555555517	555555518	555555519	555555520	555555521	555555522	555555523	555555524	555555525	555555526	555555527	555555528	555555529	555555530	555555531	555555532	555555533	555555534	555555535	555555536	555555537	555555538	555555539	555555540	555555541	555555542	555555543	555555544	555555545	555555546	555555547	555555548	555555549	555555550	555555551	555555552	555555553	555555554	555555555	555555556	555555557	555555558	555555559	5555555510	5555555511	5555555512	5555555513	5555555514	5555555515	5555555516	5555555517	5555555518	5555555519	5555555520	5555555521	5555555522	5555555523	5555555524	5555555525	5555555526	5555555527	5555555528	5555555529	5555555530	5555555531	5555555532	5555555533	5555555534	5555555535	5555555536	5555555537	5555555538	5555555539	5555555540	5555555541	5555555542	5555555543	5555555544	5555555545	5555555546	5555555547	5555555548	5555555549	5555555550	5555555551	5555555552	5555555553	5555555554	5555555555	5555555556	5555555557	5555555558	5555555559	55555555510	55555555511	55555555512	55555555513	55555555514	55555555515	55555555516	55555555517	55555555518	55555555519	55555555520	55555555521	55555555522	55555555523	55555555524	55555555525	55555555526	55555555527	55555555528	55555555529	55555555530	55555555531	55555555532	55555555533	55555555534	55555555535	55555555536	55555555537	55555555538	55555555539	55555555540	55555555541	55555555542	55555555543	55555555544	55555555545	55555555546	55555555547	55555555548	55555555549	55555555550	55555555551	55555555552	55555555553	55555555554	55555555555	55555555556	55555555557	55555555558	55555555559	555555555510	555555555511	555555555512	555555555513	555555555514	555555555515	555555555516	555555555517	555555555518	555555555519	555555555520	555555555521	555555555522	555555555523	555555555524	555555555525	555555555526	555555555527	555555555528	555555555529	555555555530	555555555531	555555555532	555555555533	555555555534	555555555535	555555555536	555555555537	555555555538	555555555539	555555555540	555555555541	555555555542	555555555543	555555555544	555555555545	555555555546	555555555547	555555555548	555555555549	555555555550	555555555551	555555555552	555555555553	555555555554	555555555555	555555555556	555555555557	555555555558	555555555559	5555555555510	5555555555511	5555555555512	5555555555513	5555555555514	5555555555515	5555555555516	5555555555517	5555555555518

REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANYUMAS TAHUN 2025

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

N O	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/037/20 23	Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Sudah terdapat dokumen rencana umum jaringan trayek untuk 15 Area di seluruh wilayah Kab. Banyumas, 1 area wilayah sudah ditetapkan yaitu di Kec. Somagede sementara 14 Area masih dalam proses	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
2	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/037/20 23	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Sudah terdapat hasil pemetaan sementara Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
3	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.025/202 4	Pengelolaan perparkiran belum sesuai ketentuan peraturan daerah tentang perparkiran	mengelola sosialisasi kepada pengelola parkir agar melaksanakan seluruh kewajiban pengelola parkir sebagaimana tertuang dalam perjanjian	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
4	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.025/202 4	pemungutan dan pembayaran retribusi sewa kios belum tertib	Dilakukannya penagihan tepat waktu dan memperbaiki SOP melkanisme penyetoran atas penerimaan pendapatan retribusi	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

5	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.025/202 4	Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan SSH Kabupaten Banyumas	telah melakukan sosialisasi peraturan terkait Pengelolaan Keuangan kepada pengelola keuangan Dinas Perhubungan	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
---	---	--	--	--

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PNEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah - Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas - pemungutan dan pembayaran retribusi sewa kios belum tertib - Pengelolaan perparkiran belum sesuai ketentuan peraturan daerah tentang perparkiran - Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan SSH Kabupaten Banyumas 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah - Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas - pemungutan dan pembayaran retribusi sewa kios belum tertib - Pengelolaan perparkiran belum sesuai ketentuan peraturan daerah tentang perparkiran - Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan SSH Kabupaten Banyumas

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	-	Memadai	-	Kurang Memadai	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai	-	-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai	-	-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai	-	-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINHUB
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	<p>1. Meningkatkan Konektivitas Wilayah</p> <p>1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota k. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota I. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota m. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <p>2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha b. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal c. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau <p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	

	<p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
	Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan Target: 0 Dokumen
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik Target: Unit
	Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik Target: 1973 Unit
	Jumlah Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik Target: Unit
	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi Target: 7 Unit
	Jumlah Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan Target: 51 Dokumen
	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani Target: 8583 Unit
	Persentase capaian kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas Target: %
	Persentase capaian kegiatan Pengendalian dan operasional LLAJ Target: %
	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kondisi baik Target: 18 Unit
	Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Target: 1 Laporan
	Jumlah angkutan umum yang beroperasi Target: 80 Unit
	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah kab/kota yang ditetapkan Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Target: 10 Dokumen
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota Target: 1 Dokumen

	Jumlah Dokumen kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota Target: 1 Dokumen	
	Jumlah izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan Target: 1 Dokumen	
	Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik Target: 2 Unit	
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 3 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 4 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Target: 3 Laporan	
	Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 3 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 5 Laporan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik Target: 1973 Unit
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi Target: 7 Unit
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan Target: 51 Dokumen
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani Target: 8583 Unit
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kondisi baik Target: 18 Unit
		Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota Target: 1

	Dokumen
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Target: 1 Laporan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang beroperasi Target: 80 Unit
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Target: 10 Dokumen
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik Target: 2 Unit
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 3 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 4 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Target: 3 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 3 Laporan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah |
Target: 5 Laporan

Purwokerto, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, S.I.P, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
Program				beroperasi sesuai ketentuan									
Ind Program				Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan									
Ind Program				Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan									
Ind Program				Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan									

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Program				Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas										
Ind Program				Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas										
Ind Program				Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas										
Ind Program				Persentase pelaksanaan Manajamen										

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
		rekayasa lalu lintas											
Kegiatan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											
Ind Kegiatan		Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan		Audit dan Inspeksi tidak memberikan efek jera bagi pelanggar	215	20902001	SDM di seksi tidak ada yang bersetif PPNS, tidak ada penindakan	Internal	C	Terjadi pelanggaran berulang	Masyarakat	DINHU	B
Kegiatan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan terlayani	Pemilik kendaraan bermotor yang terlayani	215	20902001	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan	Eksternal	C	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan yang wajib uji	Masyarakat	DINHU B	
Kegiatan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												

FORMULIR KERTAS KERJA RESIKO IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Meningkatkan Konektivitas Wilayah												
Ind Tujuan				Rasio konektivitas Wilayah										
Sasaran		Meningkatkan Konektivitas Wilayah												
Ind Sasaran				Indeks konektivitas angkutan jalan										
Ind				Indeks konektivitas										

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Sasaran				angkutan sungai									
Ind Sasaran				V C Ratio di jalan Kabupaten Kota									
Program		PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan									

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan									
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan									
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan									
Ind Program				Persentase kendaraan yang									

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
				melakukan uji laik									
Ind Program				Persentase kendaraan yang melakukan uji laik									
Ind Program				Persentase kendaraan yang melakukan uji laik									
Ind Program				Persentase kendaraan yang melakukan uji laik									

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Pihak yang Terkena	
Ind Program				Presentase ketersediaan perlengkapan jalan									
Ind Program				Presentase ketersediaan perlengkapan jalan									
Ind Program				Presentase ketersediaan perlengkapan jalan									
Ind Program				Presentase ketersediaan perlengkapan jalan									
Ind				Persentase terminal yang									

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	215	20902001	Sarana Prasarana Edukasi Keselamatan Lalu Lintas belum terpenuhi (Ruang penayangan film keselamatan belum tersedia)	Internal	C	Pemahaman masyarakat/peserta didik yang berkunjung ke Taman Edukasi Bulupitu kurang maksimal	Masyarakat	DINHU B
Ind Kegiatan				Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam	Usulan Penyediaan Perlengkapan Jalan tidak dapat dilakukan	215	20902001	Usulan Pemediaan Perlengkapan Jalan bukan berada pada jalan Kabupaten	Internal	C	Kurangnya Perlengkapan Jalan dalam rangka Pengaturan Lalu Lintas	Masyarakat	DINHU B

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
				kondisi baik									
Kegiatan		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
Kegiatan		Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir											
Ind Kegiatan		Jumlah Izin penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang		Jumlah Izin penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang	(RESIKO KEMITRAAN) Terjadinya Keterlambatan penyetoran retribusi parkir oleh	21520902001	parkir	Kurangnya kesadaran koordinator parkir mematuhi jadwal penyetoran retribusi parkir	Eksternal	C	Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terhambat	Pemerintah Daerah	DINHU B

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
			diterbitkan	koordinator parkir										
Ind Kegiatan		Jumlah Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas	21520902001				Munculnya potensi potensi kantong parkir di wilayah Kabupaten Banyumas				berkurangnya potensi PAD		DINHUB
Kegiatan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot												

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Pihak yang Terkena		
		a												
Ind Kegiatan				Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan umum	21520902001		Tidak ada pengusaha angkutan yang berminat pada jalur trayek tertentu				Mobilitas masyarakat menjadi terhambat	Masyarakat	DINHU B
Kegiatan		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a												

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
Kegiatan		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Kegiatan		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan												

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Kegiatan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
Ind Kegiatan		Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan		215	20902001	Masih banyak kurangnya kesadaran dari pemilik angkutan umum untuk tertib terhadap aturan mengenai pengujian syarat laik jalan.		Eksternal	UC	Menurunnya Tingkat keamanan dan keselamatan penumpang angkutan umum	Masyarakat	DINHU B
Kegiatan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(RLL) Keterlambatan pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai	215	20902001	Terjadi kesalahan format pada dokumen penagihan	Internal	C	Realisasi Keuangan OPD Terhambat	OPD	DINHU B
Ind Kegiatan				Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis	215	20902001	umur APILL 16 tahun yang mana jauh melewati umur teknis 5 tahun sesuai PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.7234/AJ.401/DRJD/ 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN	Internal	C	APILL sering terjadi kerusakan dan kurang maksimal	Masyarakat	DINHU B

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(PPP) Kurangnya keamaan lalu lintas sungai	21520902001	Belum tersedia nya rambu sungai	Internal	C	Operator kapal belum ada panduan rambu saat mengoperasikan kapal	Masyarakat	DINHU B			
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(PPP) Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak dapat dilaksanakan	21520902001	Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak pada jalan kabupaten	Eksternal	C	Terjadinya Penurunan Tingkat Keselamatan Jalan	Masyarakat	DINHU B			
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED	21520902001	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	Internal	C	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B			

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(FRA)	Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Penggelembungan nilai harga pada HPS	215	20902001	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	Internal	C	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(FRA)	Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu	215	20902001	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	Internal	C	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B
Ind Kegiatan		Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(FRA)	Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh	215	20902001	Rasionalisasi	Eksternal	C	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Negara									
Ind Kegiatan				Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender			1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ.			1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B
Kegiatan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											
Ind Kegiatan				Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi	Munculnya terminal bayangan	215	20902001	Fasilitas kantor/peralatan kantor kurang mencukupi, kurangnya kesadaran masyarakat agar naik dan turun	Internal	C	kemacetan lalu lintas, Kurangnya jaminan keselamatan bagi penumpang	Masyarakat	DINHU B

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Pihak yang Terkena	
								angkutan umum di terminal					
Ind Kegiatan				Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C	215	20902001	Alur penyetoran yang tidak mengikuti SOP	Internal	C	Terhambatnya pendapatan asli daerah	Pemerintah Daerah	DINHU B
Program		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai									

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Program				prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai										
Ind Program				Persentase prasarana angkutan sungai										
Ind Program				Persentase prasarana angkutan sungai										
Kegiatan		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan												

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
		Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha											
Kegiatan		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal											
Kegiatan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian											

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Pihak yang Terkena	
		Pelabuhan Sungai dan Danau											
Ind Kegiatan				Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik	Terhambatnya kegiatan pengoperasian dermaga sungai	215	20902001	Belum terpasangnya rambu sungai dan belum tersedianya trayek angkutan sungai	Internal	C	Rendahnya Kinerja konektivitas wilayah Sungai dan kegiatan masyarakat terhambat	Masyarakat	DINHU B
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA											
Ind Program				Persentase pemenuhan layanan									

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
		penunjang urusan perangkat daerah												
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Ind Kegiatan		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyajian Data Perencanaan tidak tepat waktu	XXX	20902001	yang ada	Kurangnya Ketersediaan Data	Internal	C	Tidak selarasnya antar dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA) serta terhambatnya pencapaian tujuan perangkat daerah	OPD	DINHU B	

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	XXX	20902001	Dokumen pendukung belum lengkap	Internal	C	Laporan keuangan (SPJ) tidak tepat waktu	OPD	DINHU B
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan	Keterlambatan Dokumen diketahui atau sampai kepada	XXX	20902001	Belum lengkapnya Dokumen dikelola masing - masing	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak sesuai target waktu yang ditentukan	OPD	DINHU B

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pimpinan				Bidang, Seksi, Subbag dan UPTD					
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Ind Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	XXX	20902001	Keterbatasan pengadaan Barang Milik Daerah		Internal	C	Operasional dinas kurang maksimal/terganggu	Operasional dinas kurang maksimal/terganggu	DINHU B

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD		
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena	
		Pemerintah Daerah												
Ind Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah	XXX	20902001	Metode pelaporan pembelanjaan yang kurang akuntabel	Internal	C		adanya kerugian pada anggaran belanja	Pemerintah Daerah	DINHU B	
Ind Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang		(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa	XXX	20902001	1. Kelemahan pengendalian 2. Tekanan eksternal 3. Tekanan Ekonomi 4. Penyalahgunaan wewenang sebagai	Internal	C		1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	Pemerintah Daerah	DINHU B	

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
		urusan Pemerintah Daerah						Pelaku PBJ.					
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Ind Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha		Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	XXX	20902001	terduga	Kerusakan Barang Milik Daerah yang tak terduga	Internal	C	Target pemeliharaan barang milik daerah tidak terpenuhi maksimal	OPD	DINHU B

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	SKPD	
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC		Uraian	Pihak yang Terkena
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pen Daerah									
Kegiatan													
Ind Kegiatan				Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	Penyedia Jasa masih kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan	XXX	20902001	Kurangnya pengawasan kepada penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Internal	C	kualitas pekerjaan dari penyedia jasa kurang maksimal	OPD	DINHU B

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	ROO.25	XXX	16	16	2.2	1.9	4.18
2	Keterlambatan Dokumen diketahui atau sampai kepada Pimpinan	ROO.25	XXX	16	16	2.1	2.0	4.2
3	Audit dan Inspeksi tidak memberikan efek jera bagi pelanggar	ROO.25	215	16	16	2.5	2.2	5.5
4	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.25	215	16	16	2.3	2.2	5.06
5	Usulan Penyediaan Perlengkapan Jalan tidak dapat dilakukan	ROO.25	215	16	16	2.4	2.1	5.04
6	Terhambatnya kegiatan pengoperasian dermaga sungai	ROO.25	215	16	16	2.3	2.1	4.83
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.25	XXX	16	16	2.3	2.0	4.6
8	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan	ROO.25	215	16	16	2.5	2.3	5.75
9	(RESIKO KEMITRAAN) Terjadinya Keterlambatan penyetoran retribusi parkir oleh koordinator parkir	ROO.25	215	16	16	2.5	2.2	5.5
10	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	ROO.25	XXX	16	16	2.2	2.0	4.4

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
11	Munculnya terminal bayangan	ROO.25	215	16	16	2.4	2.2	5.28
12	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan	ROO.25	215	16	16	2.8	2.4	6.72
13	Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.25	215	16	16	2.5	2.2	5.5
14	Penyedia Jasa masih kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan	ROO.25	XXX	16	16	2.3	2.0	4.6
15	(PPP) Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak dapat dilaksanakan	ROO.25	215	16	16	2.2	2.0	4.4
16	(PPP) Kurangnya keamaan lalu lintas sungai	ROO.25	215	16	16	2.3	2.1	4.83
17	(RLL) Keterlambatan pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai	ROO.25	215	16	16	2.3	2.1	4.83
18	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis	ROO.25	215	16	16	2.5	2.3	5.75
19	Penyajian Data Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25	XXX	16	16	2.3	2.0	4.6
20	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa	ROO.25	XXX	16	16	2.3	2.0	4.6
21	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara	ROO.25	215	16	16	2.4	2.0	4.8

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
22	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/ merk/produk tertentu	ROO.25	215	16	16	2.3	2.1	4.83
23	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS	ROO.25	215	16	16	2.4	2.0	4.8
24	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED	ROO.25	215	16	16	2.5	2.0	5
25	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender	ROO.25	215	16	16	2.4	2.2	5.28
26	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas	ROO.25	215	16	16	5.0	5.0	25
27	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C	ROO.25	215	16	16	5.0	5.0	25
28	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah	ROO.25	XXX	16	16	5.0	5.0	25

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPERASIONAL**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	ROO.25	XXX	16	16	4.18	DINHUB	Dokumen pendukung belum lengkap	Laporan keuangan (SPJ) tidak tepat waktu
2	Keterlambatan Dokumen diketahui atau sampai kepada Pimpinan	ROO.25	XXX	16	16	4.2	DINHUB	Belum lengkapnya Dokumen dikelola masing - masing Bidang, Seksi, Subbag dan UPTD	Dokumen pelaporan tidak sesuai target waktu yang ditentukan
3	Audit dan Inspeksi tidak memberikan efek jera bagi pelanggar	ROO.25	215	16	16	5.5	DINHUB	SDM di seksi tidak ada yang bersetif PPNS, tidak ada penindakan	Terjadi pelanggaran berulang
4	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.25	215	16	16	5.06	DINHUB	Sarana Prasarana Edukasi Keselamatan Lalu Lintas belum terpenuhi (Ruang penayangan film keselamatan belum tersedia)	Pemahaman masyarakat/peserta didik yang berkunjung ke Taman Edukasi Bulupitu kurang maksimal
5	Usulan Penyediaan Perlengkapan Jalan tidak dapat dilakukan	ROO.25	215	16	16	5.04	DINHUB	Usulan Pemediaan Perlengkapan Jalan bukan berada pada jalan Kabupaten	Kurangnya Perlengkapan Jalan dalam rangka Pengaturan Lalu Lintas
6	Terhambatnya kegiatan pengoperasian dermaga sungai	ROO.25	215	16	16	4.83	DINHUB	Belum terpasangnya rambu sungai dan belum tersedianya trayek angkutan sungai	Rendahnya Kinerja konektivitas wilayah Sungai dan kegiatan masyarakat terhambat
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.25	XXX	16	16	4.6	DINHUB	Kerusakan Barang Milik Daerah yang tak terduga	Target pemeliharaan barang milik daerah tidak terpenuhi maksimal

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
8	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan	ROO.25	215	16	16	5.75	DINHUB	Masih banyak kurangnya kesadaran dari pemilik angkutan umum untuk tertib terhadap aturan mengenai pengujian syarat laik jalan.	Menurunnya Tingkat keamanan dan keselamatan penumpang angkutan umum
9	(RESIKO KEMITRAAN) Terjadinya Keterlambatan penyetoran retribusi parkir oleh koordinator parkir	ROO.25	215	16	16	5.5	DINHUB	Kurangnya kesadaran koordinator parkir mematuhi jadwal penyetoran retribusi parkir	Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terhambat
10	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	ROO.25	XXX	16	16	4.4	DINHUB	Keterbatasan pengadaan Barang Milik Daerah	Operasional dinas kurang maksimal/terganggu
11	Munculnya terminal bayangan	ROO.25	215	16	16	5.28	DINHUB	Fasilitas kantor/peralatan kantor kurang mencukupi, kurangnya kesadaran masyarakat agar naik dan turun angkutan umum di terminal	kemacetan lalu lintas, Kurangnya jaminan keselamatan bagi penumpang
12	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan	ROO.25	215	16	16	6.72	DINHUB	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan yang wajib uji
13	Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.25	215	16	16	5.5	DINHUB	Tidak ada pengusaha angkutan yang berminat pada jalur trayek tertentu	Mobilitas masyarakat menjadi terhambat
14	Penyedia Jasa masih kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan	ROO.25	XXX	16	16	4.6	DINHUB	Kurangnya pengawasan kepada penyedia jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	kualitas pekerjaan dari penyedia jasa kurang maksimal
15	(PPP) Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak dapat dilaksanakan	ROO.25	215	16	16	4.4	DINHUB	Usulan penyediaan Prasarana Jalan tidak pada jalan kabupaten	Terjadinya Penurunan Tingkat Keselamatan Jalan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
16	(PPP) Kurangnya keamaan lalu lintas sungai	ROO.25	215	16	16	4.83	DINHUB	Belum tersedia nya rambu sungai	Operator kapal belum ada panduan rambu saat mengoperasikan kapal
17	(RLL) Keterlambatan pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai	ROO.25	215	16	16	4.83	DINHUB	Terjadi kesalahan format pada dokumen penagihan	Realisasi Keuangan OPD Terhambat
18	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis	ROO.25	215	16	16	5.75	DINHUB	umur APILL 16 tahun yang mana jauh melewati umur teknis 5 tahun sesuai PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN	APILL sering terjadi kerusakan dan kurang maksimal
19	Penyajian Data Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25	XXX	16	16	4.6	DINHUB	Kurangnya Ketersediaan Data yang ada	Tidak selarasnya antar dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA) serta terhambatnya pencapaian tujuan perangkat daerah
20	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa	ROO.25	XXX	16	16	4.6	DINHUB	1. Kelemahan pengendalian 2. Tekanan eksternal 3. Tekanan Ekonomi 4. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya
21	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara	ROO.25	215	16	16	4.8	DINHUB	Rasionalisasi	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
22	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu	ROO.25	215	16	16	4.83	DINHUB	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya
23	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS	ROO.25	215	16	16	4.8	DINHUB	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya
24	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED	ROO.25	215	16	16	5	DINHUB	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya
25	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender	ROO.25	215	16	16	5.28	DINHUB	1. Tekanan dari atasan 2. Tekanan dari eksternal 3. Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ.	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya
26	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas	ROO.25	215	16	16	25	DINHUB	Munculnya potensi potensi kantong parkir di wilayah Kabupaten Banyumas	berkurangnya potensi PAD
27	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C	ROO.25	215	16	16	25	DINHUB	Alur penyetoran yang tidak mengikuti SOP	Terhambatnya pendapatan asli daerah
28	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah	ROO.25	XXX	16	16	25	DINHUB	Metode pelaporan pembelanjaan yang kurang akuntabel	adanya kerugian pada anggaran belanja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							
	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/03 7/2023	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST .037/2023	KE	1	Survey karakteristik perjalanan masyarakat kawasan perkotaan purwokerto	Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Triwulan IV
	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.02 5/2024	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST .025/2024	KE	1	melakukan penagihan tepat waktu dan memperbaiki SOP melkanisme penyetoran atas penerimaan pendapatan retribusi	Kepala Bidang Prasarana dan Kassubag Keuangan	Triwulan IV

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.02 5/2024	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST .025/2024	KE	1	melakukan sosialisasi peraturan terkait Pengelolaan Keuangan kepada pengelola keuangan Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas	Triwulan IV
	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST.02 5/2024	LHP 700/074.PKPT/195/IRBAN.4/ST .025/2024	KE	1	Sosialisasi kepada pengelola parkir agar melaksanakan seluruh kewajiban pengelola parkir sebagaimana tertuang dalam perjanjian	Kepala Bidang Dalops dan Perparkiran, Kepala Seksi Perparkiran	Triwulan IV
	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/03 7/2023	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST /037/2023	KE	1	melakukan survei rencana umum jaringan trayek di wil. Kabupaten Banyumas	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Kepala Seksi Angkutan	Triwulan IV

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Risiko Operasional**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan		Pelaksanaan sosialisasi kepada pengusaha dan pengemudi angkutan umum terkait Permenhub Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Pembinaan Terhadap Pengusaha Angkutan dan pengemudi terkait Penerapan Permenhub Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Kepala Dinas, Kabid Angkutan dan Keselamatan, Kasi Angkutan	Triwulan I,II,III,IV
2	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan		Sudah melakukan uji petik / ramcheck kendaraan di terminal-terminal	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan Ramcheck di jalan-jalan Kabupaten dan melibatkan kepolisian serta Melakukan Kolaborasi dengan PPNS Dinas Lain untuk penindakan pelanggaran	Kepala Dinas, Kabid Dalpos dan Perparkiran, Kabid Angkutan dan Keselamatan	Triwulan I,II,III,IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
3	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis		Melakukan pendataan dan perbaikan saat terjadi kerusakan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat usulan reabilitasi total atau pembaruan unit APILL yang telah melebihi umur Teknis	Kepala Dinas, Kabid Lalu Lintas	Triwulan II
4	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Kepala Dinas	Triwulan I
5	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi	Kepala Dinas	Triwulan I

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						WBS		
6	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Kepala Dinas	Triwulan I

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
7	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Mengetatkan HPS sehingga semakin kecil peluang untuk terjadinya mark up HPS	Kepala Dinas	Triwulan I
8	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Kepala Dinas	Triwulan I

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Reviu proses PBJ oleh APIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Kepala Dinas	Triwulan I
10	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas		Telah dilakukan Sosialisasi terhadap Pengelola Parkir agar melakukan pegawasan dan menerapkan ketentuan Perda tentang Perparkiran	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Razia terhadap Juru Parkir Liar di Wilayah Kabupaten Banyumas	Kepala Bidang Dalops dan Perparkiran	Triwulan I,II,III,IV
11	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C		Penerapan Terkait SOP mekanisme penyetoran atas penerimaan pendapatan retribusi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Mapping Potensi pendapatan Retribusi Kios di terminal Tipe C	Kassubag Keuangan	Triwulan I,II,III,IV
12	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah		Melakukan Sosialisasi terkait peraturan pengelolaan keuangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Melakukan Perubahan metode pembayaran belanja menjadi	Kassubag Keuangan	Triwulan I,II,III,IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			kepada pengelola keuangan Dinas		mampu menangani risiko yang teridentifikasi	akuntabel,terukur, dan terpantau		

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
OPERASIONAL OPD**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan Pembinaan Terhadap Pengusaha Angkutan dan pengemudi terkait Penerapan Permenhub Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
2	Pelaksanaan Ramcheck di jalan-jalan Kabupaten dan melibatkan kepolisian serta Melakukan Kolaborasi dengan PPNS Dinas Lain untuk penindakan pelanggaran	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
3	Membuat usulan reabilitasi total atau pembaruan unit APILL yang telah melebihi umur Teknis	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
4	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
5	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
6	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
7	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Mengetatkan HPS sehingga semakin kecil peluang untuk terjadinya mark up HPS	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
8	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
9	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I	13 Januari 2025	Sosialisasi RTP 2025
10	Melakukan Razia terhadap Juru Parkir Liar di Wilayah Kabupaten						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Banyumas						
11	Melakukan Mapping Potensi pendapatan Retribusi Kios di terminal Tipe C						
12	Melakukan Perubahan metode pembayaran belanja menjadi akuntabel,terukur, dan terpantau						

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
OPERASIONAL OPD**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan Pembinaan Terhadap Pengusaha Angkutan dan pengemudi terkait Penerapan Permenhub Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	Triwulan I	13 Februari 2025	Audiensi Pengusaha Angkutan Roda Tiga
2	Pelaksanaan Ramcheck di jalan-jalan Kabupaten dan melibatkan kepolisian serta Melakukan Kolaborasi dengan PPNS Dinas Lain untuk penindakan pelanggaran	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas, Kepala Bidang Dalops dan Perparkiran	Triwulan I	19 Februari dan 17 Maret 2025	Ramcheck PO bus
3	Membuat usulan reabilitasi total atau pembaruan unit APILL yang telah melebihi umur Teknis	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bidang Lalu Lintas		17 Januari dan 30 Januari	Survey Kebutuhan untuk pemenuhan Perlengkapan Jalan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
4	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai
5	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai
6	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	3. Pendampingan APH dalam proses PBJ					
7	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Mengetatkan HPS sehingga semakin kecil peluang untuk terjadinya mark up HPS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
8	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai
9	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I	6 Januari 2025	Apel Pagi Pegawai
10	Melakukan Razia terhadap Juru Parkir Liar di Wilayah Kabupaten Banyumas					
11	Melakukan Mapping Potensi pendapatan Retribusi Kios di terminal Tipe C					

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
12	Melakukan Perubahan metode pembayaran belanja menjadi akuntabel,terukur, dan terpantau					

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya kemungkinan keterlambatan penyetoran Retribusi Kios Terminal Tipe C	ROO.21.215.16.16					Melakukan Mapping Potensi pendapatan Retribusi Kios di terminal Tipe C	Triwulan I,II,III,IV		
2	(FRA) Manipulasi perhitungan volume pekerjaan pada penyusunan DED	ROO.21.215.16.16					1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Triwulan I		
3	(FRA) Pekerjaan tidak sesuai Kontrak/ketentuan pada penyediaan Barang/Jasa	ROO.21.XXX.16.16					1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup	Triwulan I		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
							59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ			
4	(FRA) Penambahan persyaratan pada syarat kualifikasi tender	ROO.21.215.16.16					1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS	Triwulan I		
5	(FRA) Penggelembungan nilai harga pada HPS	ROO.21.215.16.16					1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2.	Triwulan I		

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
6	(FRA) Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/ merk/produk tertentu	ROO.21.215.16.16					Mengetatkan HPS sehingga semakin kecil peluang untuk terjadinya mark up HPS			
7	(FRA) Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan proyek yang dilelang oleh Negara	ROO.21.215.16.16					1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS 3. Pendampingan APH dalam proses PBJ	Triwulan I		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
							59/2017) secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS			
8	Masih terdapat Angkutan umum yang tidak tertib aturan keselamatan jalan	ROO.21.215.16.16					Melakukan Pembinaan Terhadap Pengusaha Angkutan dan pengemudi terkait Penerapan Permenhub Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Triwulan I,II,III,IV		
9	Munculnya Juru Parkir Liar di wilayah Kabupaten Banyumas	ROO.21.215.16.16					Melakukan Razia terhadap Juru Parkir Liar di Wilayah Kabupaten Banyumas	Triwulan I,II,III,IV		
10	Pemalsuan Dokumen Belanja Daerah	ROO.21.XXX.16.16					Melakukan Perubahan metode pembayaran belanja menjadi akuntabel,terukur, dan terpantau	Triwulan I,II,III,IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
11	Pemilik kendaraan tidak taat kewajiban uji kendaraan	ROO.21.215.16.16			Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan yang wajib uji		Pelaksanaan Ramcheck di jalan-jalan Kabupaten dan melibatkan kepolisian serta Melakukan Kolaborasi dengan PPNS Dinas Lain untuk penindakan pelanggaran	Triwulan I,II,III,IV		
12	(RLL) Kualitas layanan APILL menurun dan terjadi kerusakan karena umur teknis	ROO.21.215.16.16					Membuat usulan rehibuitasi total atau pembaruan unit APILL yang telah melebihi umur Teknis	Triwulan II		